



Selesaikan Temuan BPK

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Barat berupaya menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan secepatnya. Temuan tersebut mulai dari tahun 2004. "Sejak adanya undang-undang mengenai BPK, ada 47 kali pemeriksaan (di Kalbar) yang dilakukan periodik. Jadi temuan itu ada yang tahun 2004 dan 2005."

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Selesaikan Temuan BPK

Sambungan dari halaman 9

ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Senin (14/3), se usai pertemuan bersama kepala Satuan Kerja Perangkat daerah di Kantor Gubernur Kalbar.

Christiandy mengatakan Pemprov sangat ingin mengelola keuangan sesuai dengan undang-undang. Pemanfaatan keuangan negara harus berdasarkan prosedur yang benar. Kendati demikian, masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan temuan itu. Ia mencontohkan

temuan berkenaan dengan DPRD Provinsi Kalbar. Sebelumnya ada aturan pemberian rumah bagi anggota dewan. Tetapi seiring waktu, terbit aturan yang mengharuskan rumah itu dikembalikan.

"Ternyata ada yang sudah meninggal. Bagaimana tindak lanjutnya?" kata Christiandy. Menurut Christiandy, Pemprov Kalbar melibatkan Inspektorat dalam menyelesaikan temuan yang ada, termasuk berkenaan dengan aset. Pada 22 Maret mendatang akan dilaksanakan pertemuan bersama Inspektorat. "Jangan

berfikir bahwa temuan BPK hingga 2015 yang jumlahnya sampai miliaran rupiah ada di zaman (masa pemerintahan) kami. Itu dari 2004," ujar Christiandy. Ia menuturkan dalam pertemuan itu pihaknya akan memilah temuan-temuan tersebut. Sebagian besar merupakan temuan administrasi. Temuan-temuan yang bisa diselesaikan dalam seminggu akan dikelompokkan menjadi satu. "Jika administrasinya beres, berarti persoalan keuangannya juga selesai. Ini yang akan kami bahas," jelas Christiandy. (uni)